

PRIORITAS JANGKA PENDEK DI BIDANG EKONOMI

Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

Jakarta, Juni 1998

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan terasa semakin dalam, yang dihadapi Indonesia dewasa ini memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Kabinet Reformasi Pembangunan telah bertekad untuk berjuang agar perekonomian Indonesia dapat pulih kembali secepat mungkin. Hal ini tentunya diharapkan pula oleh dunia usaha.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi maka kita perlu menentukan prioritas dalam mengambil langkah kebijaksanaan, sehingga dengan demikian sumber daya yang makin terbatas itu dapat kita gunakan secara tepat, terarah, dan rakyat dapat segera merasakan hasilnya yang nyata. Berikut ini adalah kerangka besar langkah-langkah yang perlu ditempuh.

I. MEMULIHKAN PEREKONOMIAN

A. EKONOMI MASYARAKAT

1. Jaring Penyelamat Sosial (Social Safety Net)

Krisis ekonomi yang terjadi dewasa ini telah menimbulkan dampak yang sangat memberatkan bagi kita semua, terlebih bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kekeringan panjang, kebakaran hutan, merosotnya nilai rupiah, rapuhnya perbankan, meningkatnya harga-harga, rentetan kerusuhan sosial, dan ketidakstabilan politik adalah di antara berbagai faktor yang telah menyebabkan roda perekonomian menjadi tersendat-sendat.

Salah satu kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi dewasa ini adalah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi. Penyesuaian harga akibat merosotnya nilai rupiah dan kekeringan panjang yang melanda Indonesia, telah memicu melonjaknya harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Situasi ini telah memperburuk tingkat kesejahteraan keseluruhan masyarakat, terlebih mereka yang berpendapatan rendah yang memang sudah hidup dalam situasi pas-pasan. Jika hal ini berkepanjangan maka dikhawatirkan berbagai gejala sosial akan terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini maka ditempuh dua hal pokok:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok

Terus meningkatkan tersedianya berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti pangan dan juga obat-obatan, adalah tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam situasi yang kita hadapi dewasa ini. Dengan produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, maka impor berbagai kebutuhan pokok harus dilakukan. Agar harga bahan kebutuhan pokok tersebut terjangkau, maka subsidi menjadi tidak terelakkan. Tentu, subsidi tersebut harus diberikan secara selektif; artinya tingkat subsidi untuk kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah harus lebih besar daripada subsidi untuk komoditi lainnya.

b. Program padat karya

Dengan tingkat pengangguran yang terus meningkat sebagai akibat macetnya kegiatan produksi dan banyaknya pemutusan hubungan kerja maka untuk menopang menurunnya kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, pemerintah akan terus melanjutkan penciptaan lapangan kerja produktif melalui program padat karya. Mekanisme kerja program ini akan terus disempurnakan sehingga benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang dituju.

2. Menggerakkan roda perekonomian

Dalam kemacetan roda perekonomian yang kita hadapi dewasa ini, maka berbagai terobosan kebijaksanaan sangatlah diperlukan sehingga kita dapat segera memutar kembali roda perekonomian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu langkah yang ditempuh di antaranya adalah:

a. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi

Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian sebagian besar masyarakat, maka upaya khusus akan diberikan bagi kelangsungan hidup usaha kecil, menengah, dan koperasi yang ternyata dalam situasi krisis ekonomi yang terjadi dewasa ini mereka dapat bertahan dengan tegar.

b. Membangun kembali sektor produksi

Kita harus berupaya untuk menjaga kelancaran produksi di bidang yang mempunyai keunggulan, seperti di bidang pertambangan, pertanian dan perkebunan. Produksi komoditi agrobisnis/agroindustri mempunyai peluang untuk tetap bertahan bahkan meningkat di tengah krisis yang kita alami ini. Demikian pula dengan produksi komoditi industri manufaktur yang padat sumber daya tenaga kerja harus tetap dapat dipertahankan.

c. Pariwisata

Menurunnya nilai rupiah seharusnya menjadikan sektor pariwisata lebih bersaing. Sayangnya berbagai permasalahan lainnya, seperti gejolak sosial dan politik telah menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastis. Oleh karena itu kita harus segera kembali membangun image Indonesia agar dikunjungi oleh wisatawan asing, sehingga sektor pariwisata kembali dapat diandalkan sebagai penyedia lapangan kerja dan penghasil devisa.

d. Ekspor tenaga kerja

Ekspor tenaga kerja sebagai sumber pendapatan dan penghasilan devisa harus lebih kita dorong. Berbagai hambatan perlu dihilangkan. Demikian pula dengan keselamatan TKI di luar negeri perlu lebih mendapat perhatian.

e. Menggenjot ekspor

Hal yang perlu mendapat prioritas pula adalah upaya untuk menggenjot ekspor. Dengan ekspor, maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertahan atau bahkan meningkat sehingga pendapatan masyarakat tidak menurun bahkan dapat meningkat. Dan bersamaan dengan itu penghasilan devisa yang sangat kita butuhkan dewasa ini akan bertambah. Oleh karena itu berbagai hambatan ekspor yang masih ada harus dihilangkan.

B. MENYEHATKAN PERBANKAN

Sebagai penunjang pokok bagi berputarnya roda perekonomian masyarakat maka adanya suatu sistim perbankan yang sehat dan yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat sangat penting. Dalam keadaan sistim perbankan kita yang sakit ini, maka upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan adalah mutlak.

a. Bank dalam binaan BPPN

Bagi bank-bank yang berada dalam binaan BPPN, maka terapi serta program penyehatan yang ditentukan oleh BPPN haruslah diikuti sepenuhnya. Ketegasan dalam mengambil sikap atas hasil analisis yang dilakukan oleh bank-bank dalam binaan BPPN sangatlah penting. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan kembalinya dunia perbankan yang sehat akan sulit dibangun.

b. Bank di luar BPPN

Sementara itu, bagi bank-bank di luar BPPN, peningkatan kinerja dari waktu ke waktu harus terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Jangan sampai bank-bank yang berada di luar BPPN terkena pula imbas bank-bank yang bermasalah.

C. MENGAMANKAN APBN

Dalam situasi sektor swasta menghadapi berbagai masalah dewasa ini, maka sektor pemerintah harus dapat tampil sebagai penyelamat. Untuk itu maka langkah yang ditempuh adalah:

a. Mengamankan Penerimaan

Kalaupun basis penerimaan pemerintah dewasa ini sangat tidak dapat diharapkan (karena basis pajak menurun, harga minyak rendah, dlsb) namun pemerintah tetap harus dapat mencari sumber-sumber penerimaan non-konvensional lainnya, seperti penjualan BUMN atau mengupayakan dari pinjaman luar negeri. Dengan besarnya subsidi yang harus dipikul oleh pemerintah, maka sangat mungkin defisit anggaran akan meningkat.

b. Mengefektifkan Pengeluaran

Dalam situasi dimana penerimaan dengan susah payah harus diamankan maka pemerintah perlu benar-benar melaksanakan kebijaksanaan pengeluaran yang terarah dan efektif sehingga dapat menanggulangi krisis yang dihadapi ini. Rasionalisasi pengeluaran rutin perlu dilakukan. Penajaman pengeluaran pembangunan harus ditempuh sehingga benar-benar ke arah kegiatan yang mempunyai dampak penciptaan pendapatan dan lapangan kerja yang paling besar. Lemak-lemak pengeluaran pembangunan harus dihilangkan.

II. MELANJUTKAN DAN MENINGKATKAN REFORMASI DI BIDANG EKONOMI

A. PROGRAM DENGAN IMF, WB, DAN ADB

Pemerintah telah bertekad untuk terus melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang telah dicapai dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Dengan demikian diharapkan perekonomian Indonesia akan lebih efisien, produktif, tangguh dan andal. Terdapat lima fokus bahasan yang menjadi agenda reformasi bidang ekonomi, yaitu:

a. Bidang moneter

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi makro maka kebijaksanaan moneter bersama dengan kebijaksanaan fiskal tetap akan dilakukan secara hati-hati. Bank Indonesia akan menjalankan kebijaksanaan moneter yang mengikuti perkembangan perekonomian (pasar) dengan transparan dan independen. Berbagai besaran moneter diumumkan secara berkala sehingga dapat membentuk ekspektasi masyarakat yang lebih terarah. Saat ini sedang disusun RUU mengenai Bank Sentral yang mendapat bantuan teknis dari Bundes Bank.

b. Bidang fiskal

Transparansi anggaran pemerintah akan ditingkatkan dan berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran yang di luar anggaran (*off-budget*) akan dihilangkan. Berbagai subsidi yang diberikan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk biaya untuk penyehatan sistim perbankan, akan dimasukkan ke dalam anggaran. Berbagai sumber penerimaan pemerintah, baik pajak maupun bukan pajak, akan terus diefektifkan. Di sisi pengeluaran, penajaman prioritas menurut urgensi permasalahan dan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas akan lebih diefektifkan.

c. Restrukturisasi perbankan

Terwujudnya sistim perbankan yang sehat dengan aturan-aturan yang ditegakkan dengan konsisten merupakan syarat bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Berdirinya BPPN adalah upaya untuk menata kembali sistim perbankan yang dirasakan sangat bermasalah dewasa ini. Untuk memperoleh hasil kerja yang memenuhi standar profesional dan integritas yang tinggi maka para auditor internasional dilibatkan dalam upaya penyehatan dunia perbankan nasional.

d. Reformasi struktural

Upaya penyehatan perekonomian nasional akan terus dimantapkan melalui perangkat kebijaksanaan guna menghapuskan berbagai distorsi yang ada. Langkah kebijaksanaan dalam reformasi struktural yang akan ditempuh telah dijadwalkan dengan ketat dan pemerintah bertekad untuk secara konsisten melaksanakan agenda reformasi. Termasuk di dalam agenda reformasi ini adalah pembuatan UU persaingan sehat dan UU anti-monopoli. Dengan demikian diharapkan perekonomian Indonesia akan menjadi lebih efisien, produktif, tangguh, dan andal dalam menghadapi berbagai gejolak yang datang.

e. Penyelesaian hutang luar negeri swasta

Disadari bahwa permasalahan krisis ekonomi yang kita hadapi dewasa ini menjadi tambah berat dengan relatif besarnya hutang luar negeri perusahaan swasta, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Masa keemasan dana murah dari luar negeri menjadi sirna dengan terus merosotnya nilai rupiah. Tim penyelesaian hutang luar negeri swasta yang diketuai oleh Pak Radius Prawiro berupaya keras agar masalah hutang perusahaan swasta, hutang antar-bank, dan pembiayaan perdagangan dapat diselesaikan secara "win-win" baik bagi para debitur maupun kreditur. Negosiasi terakhir di Frankfurt telah membawa angin segar. Dan pembentukan Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) yang akan dikelola oleh Bank Indonesia merupakan badan yang akan memfasilitasi penyediaan devisa yang dibutuhkan bagi pembayaran hutang di kemudian hari.